



APEKSI
A S O S I A S I
PEMERINTAH KOTA
SELURUH INDONESIA

Isu-Isu Strategis Yang Dapat Diangkat dan Dikembangkan oleh Peserta dalam Forum Sekretaris Daerah Kota Seluruh Indonesia

1

Perpres No. 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional dikeluarkan setelah daerah selesai menyusun RKPD Tahun 2024, terutama daerah yang mengalami akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2023.

2

Perpres No. 53 Tahun 2023 merubah ketentuan perjalanan dinas bagi DPRD dari at cost (biaya riil) menjadi lumpsum. Apakah ketentuan ini berdampak bagi pemerintah daerah?

3

Surat Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.2/15920/Keuda, memuat ketentuan komponen biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD disetarakan dengan Kepala Daerah/pejabat Eselon I dan anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II, dan berlaku lumpsum dengan memakai batas tertinggi untuk pimpinan dan anggota DPRD. Apakah ketentuan ini berdampak bagi pemerintah daerah?

4

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum APBD Tahun 2024 belum memasukkan ketentuan tentang standar satuan biaya untuk sewa mobil dan standar harga pembelian dan pemeliharaan mobil listrik.

5

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2023 Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota belum memasukkan hal-hal yang dievaluasi atau bidang penilaian yang dijadikan bahan evaluasi bagi Pj Kepala Daerah. Bagaimana dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah?

6

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pemerintah daerah wajib menganggarkan dana hibah kegiatan PILKADA sebesar 40% TA 2023 dan 60% TA 2024. Apa hambatan dan tantangannya bagi pemerintah daerah?

7

Usulan kebutuhan anggaran kegiatan PILKADA berpedoman pada peraturan standar satuan biaya kebutuhan yang berbeda. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Kesbangpol memiliki peraturan Standar satuan biaya yang berbeda dengan KPU dan BAWASLU. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah menghadapi perbedaan ketentuan standar harga tersebut?

8

Pemerintah Daerah di 1 (satu) Provinsi yang sama diwajibkan untuk melakukan pembiayaan bersamadalam kegiatan PILKADA. Apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah?

9

Pemerintah Daerah wajib menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan Berita Acara besaran anggaran kegiatan PILKADA. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya daerah yang dipimpin oleh Pj Kepala Daerah?

10

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN dan PPPK sampai dengan TA 2024. Bagaimana penganggaran selanjutnya di TA 2025?

11

Revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menghapus keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apa dampaknya bagi pemerintah daerah paska dihapuskannya KASN?

12

UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah telah merubah ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apa tantangan pemerintah daerah terhadap ketentuan tersebut?